

Judul : Revisi UU Sisdiknas Beri Harapan bagi Guru
Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Revisi UU Sisdiknas Beri Harapan bagi Guru

Komisi X DPR menyatakan komitmennya bahwa melalui Revisi UU Sisdiknas, dapat dilakukan pembenahan terhadap berbagai kategori guru, termasuk menghapus skema membingungkan, seperti PPPK atau honorer.

JAKARTA, KOMPAS — Hari Pendidikan Nasional 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memulihkan profesi guru di Indonesia melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi baru yang sedang digodok ini mesti menempatkan guru sejajar dengan profesi strategis lain demi mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidatyi mengatakan, para wakil rakyat dan pemerintah sekuat tenaga harus mengangkat setinggi-tingginya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Terkait hal tersebut, Kurniasih mendorong reformasi tata kelola guru. Reformasi tersebut mulai dari pembenahan terhadap beragam status kepegawaian hingga belum meratanya sertifikasi pendidikan.

Kondisi ini berdampak pada ketimpangan kesejahteraan dan perlindungan. Karena itu, RUU Sisdiknas perlu merapikan berbagai kategori guru, termasuk menghapus skema yang dinilai membingungkan, seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu atau honorer.

"Kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Saya berharap nanti tidak boleh ada lagi PPPK yang paruh waktu, PPPK honorer. Kita pusing juga itu, ya. Banyak banget kategorinya, kluster-klusternya itu. Terlalu banyak," kata Kurniasih saat dihubungi dari Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pembaruan lain dalam RUU Sisdiknas, lanjut Kurniasih, adalah rencana pembentukan Rancangan Induk Pembanguan (RIP) Pendidikan, yang akan menjadi acuan jangka panjang pembangunan pendidikan nasional. Dengan adanya RIP, kebijakan pendidikan diharapkan lebih kon-

sisten dan tidak mudah berubah setiap pergantian menteri.

"Jadi, untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang sekarang, ada rujukannya, nanti diturunkan teknisnya ke peraturan pemerintah," ujarnya.

Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 ini, Kurniasih menilai sejumlah capaian kinerja pemerintah di sektor pendidikan dalam dua tahun terakhir masih harus ditingkatkan. Mulai dari penguatan kapasitas guru, perbaikan kurikulum yang adaptif, perlindungan anak, hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

RUU Sisdiknas telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan ditargetkan rampung pada 2026.

Fokus RUU tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan guru, kodifikasi hukum pendidikan, wajib belajar 13 tahun, hingga integrasi sistem keagamaan demi menciptakan pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Transformasi pendidikan

Meski demikian, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir menilai, keberhasilan RUU ini akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam melakukan transformasi menyeluruh, tidak hanya administratif, tetapi juga kultural dan struktural.

Dudung mengungkapkan, realitas menunjukkan profesi guru belum sepenuhnya dimuliakan. Masih banyak guru dengan kesejahteraan rendah dan status kerja beragam sehingga berdampak terhadap menurunnya minat generasi muda untuk menjadi pendidik.

Data PGRI menunjukkan penurunan signifikan minat

anak muda untuk menjadi guru dan dosen, dari 17 persen pada 2022 menjadi sekitar 11 persen pada 2024. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masa depan pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa membangun kualitas pendidikan yang menantang?" kata Dudung.

Menurut Dudung, arah kebijakan pendidikan nasional masih kurang tepat sasaran. Sebab, pemerintah terlalu fokus pada perubahan kurikulum, padahal persoalan utama justru terletak pada kualitas guru.

Untuk meningkatkan kualitas guru, PGRI mendorong penguatan kapasitas secara menyeluruh, terutama dalam literasi, numerasi, serta kemampuan pedagogis dan metodologis. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna dan menyampaikan pelajaran yang efektif kepada siswa.

"Guru yang berkualitas harus mampu menemukan fakta, data, dan informasi, mengolahnya menjadi konsep, kemudian berkembang menjadi generalisasi hingga menjadi pengetahuan prosedural yang tersusun sistematis," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan guru yang benar-benar berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas program. Dalam hal ini, kemampuan memahami teks, berpikir inferensial, hingga penguasaan logika matematika menjadi fondasi penting yang harus diperkuat.

Di sisi lain, transformasi pembelajaran juga menjadi keharusan. Dudung menilai masih banyak siswa yang belajar tanpa benar-benar memahami materi sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna, menarik,

dan membahagiakan.

"Semua itu harus dilakukan berbasis masalah nyata dan kearifan lokal mengingat Indonesia memiliki keragaman yang sangat luas," ucap Dudung.

Transparansi anggaran

Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menambahkan, perlunya transparansi penggunaan anggaran, prioritas pada peningkatan mutu guru, dan evaluasi program-program besar agar tak sekadar jadi proyek administratif. Tanpa pengawasan yang ketat, anggaran besar bisa kehilangan dampak nyata bagi siswa dan guru.

"Porsi 20 persen anggaran untuk pendidikan apakah sudah benar-benar tepat sasaran? Menghormati guru tidak cukup dengan narasi, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret," kata Fahriza.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan pers menjelaskan, tata kelola guru ke depan akan dibangun dalam satu siklus utuh yang mencakup rekrutmen, pengembangan, kinerja, kesejahteraan, hingga karier. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi profesi guru.

Namun, Fajar menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial, tetapi membutuhkan dukungan sistemik dari pemerintah daerah dan pusat.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan sesaat. Yang dibutuhkan adalah ekosistem pembelajaran guru yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan didukung kebijakan yang konsisten," kata Fajar saat dialog bersama pemerintah daerah dan perwakilan guru se-Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (2/5) lalu. (TIO)